



Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Meisye Fordatkosu¹, Hengky. V. R. Pattimukay², I. Y. Rahanra³
^{1,2,3} *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pattimura*
e-mail: Mesyenofordatkosu@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Juli 2023]
Revised [10 November 2023]
Accepted [12 Desember 2023]

KEYWORDS

The Role of the Departement of Fisheries, Seaweed Farmers.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Desa Matakus. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam Proses Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Desa Matakus. Hasil penelitian menunjukkan (1). Dalam Pemberian Pelatihan Dinas Perikanan memfokuskan pada penentuan lokasi, penyediaan bibit dan perancangan metode budidaya itu sangat membantu para petani rumput laut dalam menghadapi permasalahan yang ada. Misalnya dalam menangani hama. (2). Dalam memberikan bantuan alat kepada petani rumput laut sangat terbantu karena kebanyakan dari petani rumput laut, alat-alat yang dimiliki oleh para petani tersebut sudah lama dan mengalami kerusakan. (3). Dalam pemberian dana kepada petani rumput laut dapat membantu para petani dalam melengkapi infrastruktur budidaya seperti untuk membeli patok, gabus, tali utama dan juga meningkatkan semangat petani rumput laut dalam membudidayakan rumput laut yang ada. Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan kepada Dinas Perikanan agar terus mengadakan pelatihan bagi pembudidaya rumput laut untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya dalam budidaya rumput laut. Diharapkan Dinas Perikanan terus memberikan bantuan alat kepada petani agar selama proses budidaya petani tidak kekurangan alat yang dibutuhkan. Diharapkan Dinas Perikanan terus memberikan dana kepada pembudidaya rumput laut dalam memenuhi segala kebutuhan pembudidaya dan dapat meningkatkan produksi rumput laut di Desa Matakus.

ABSTRACT

This research is a qualitative descriptive study that aims to find out the role of the Fisheries Service in Empowering Seaweed Farmers in Matakus Village. This research was conducted in Matakus Village, South Tanimbar District, Tanimbar Islands Regency. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were considered to be directly involved in the Process of the Fisheries Service's Role in Empowering Seaweed Farmers in Matakus Village. The research results show (1). In providing training, the Fisheries Service focuses on determining the location, providing seeds and designing cultivation methods that really help seaweed farmers in dealing with existing problems. For example in dealing with pests. (2). Providing tools to seaweed farmers is very helpful because most of the seaweed farmers have old tools and are damaged. (3). Providing funds to seaweed farmers can assist farmers in completing cultivation infrastructure such as buying stakes, cork, main rope and also increasing the enthusiasm of seaweed farmers in cultivating existing seaweed. Based on the results of the research above, it is suggested to the Department of Fisheries to continue to conduct training for seaweed farmers to improve the ability of farmers in seaweed cultivation. It is hoped that the Fisheries Service will continue to provide tool assistance to farmers so that during the cultivation process the farmers do not lack the tools needed. It is hoped that the Fisheries Service will continue to provide funds to seaweed farmers in meeting all the needs of farmers and can increase seaweed production in Matakus Village.

PENDAHULUAN

Tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik sebagai perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah pusat perlu menerapkan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada

daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang menegaskan bahwa daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktivitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban secara konsisten mengelola potensi-potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah pengembangan dan pengelolaan di wilayah pesisir, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bangsa dan Negara. Salah satu cara mengupayakan kesejahteraan masyarakat pesisir yaitu dengan cara pemberdayaan.

Kurang lebih 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari laut, yang pantainya kaya akan berbagai jenis sumber hayati, dan lingkungannya sangat potensial untuk dikembangkan. Keadaan ini merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan yang serasi dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan baik karena pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Dalam memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pesisir disesuaikan karakteristik dan potensi sumber daya yang tersedia, antara lain memberdayakan petani rumput laut.

Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus merupakan mandat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, sebagaimana pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam mendukung terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu "Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015".

Profil nilai sosial ekonomi rumput laut di Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu dikaji untuk memberikan gambaran tentang aktivitas budidaya di kabupaten tersebut, bagaimana keterkaitannya dengan kondisi sosial ekonomi pembudidaya di sekitarnya dan mengenai seberapa besar nilai ekonomi aktivitas budidaya rumput lautnya. Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah kepulauan yang mempunyai luas 52.995,20 km², terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km² (19,06%) dan wilayah laut seluas 42.892,28 km² (80,94%). Dengan garis pantai sepanjang 1.626,27 km, kabupaten ini memiliki hamparan potensial untuk budidaya rumput laut seluas 21.979,93 ha yang terdapat di sembilan kecamatan. (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Maluku Tenggara Barat, 2011).

Rumput laut sebagai salah satu komoditas ekspor yang merupakan sumber devisa Negara dan sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir pantai. Rumput laut secara ilmiah di kenal dengan istilah alga atau ganggang yang mana rumput laut termasuk salah satu tumbuhan yang berklorofil. Tanaman ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang kita ketahui rumput laut bisa digunakan sebagai bahan makan, diolah menjadi agar-agar, Rumput laut juga banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi dan kosmetika. Banyak nelayan yang membudidayakan komoditas ini, hal ini disebabkan karena budidaya rumput laut mempunyai prospek yang sangat bagus. Betapa tidak, sektor rumput laut Nasional telah menjadi salah satu primadona yang diperhitungkan dalam penciptaan lapangan kerja khususnya di bidang Kelautan dan Perikanan. (Ongkomulyo : 2006).

Desa Matakus merupakan salah satu pemasok rumput laut terbesar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun di awal tahun 2020 produksi serta penjualan petani rumput laut mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dipengaruhi oleh cuaca yang sering kali mengalami perubahan dan harga jual rumput laut yang mengalami penurunan diakibatkan oleh salah satu faktor yaitu Covid 19. Berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Maluku Tenggara Barat, 2011. Produksi perikanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencapai 500-600 ton per pasca panen, berasal dari beberapa sentral produksi terbesar diantaranya Larat 180 ton per pasca panen, Selaru 90-120 ton per pasca panen, Wermaktian 100-130 ton, dan yamdema. Kondisi cuaca yang baik petani rumput laut di desa Matakus dapat memproduksi rumput laut kering per minggu mencapai 8-12 ton. Namun, pada kondisi cuaca buruk produksi rumput laut dapat dicapai 6-10 ton. Sedangkan harga rumput laut kering disaat pandemic Covid-19 berkisar Rp.17.000-18.000 (harga normal sebelum pandemic Covid-19 berkisar Rp. 21.000 – 23.000).

Rendahnya harga rumput laut kering beberapa tahun terakhir kian memperpanjang kisah kelam masyarakat di desa Matakus Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Beban hidup yang kian berat telah membuat para petani kurang menyadari, bahkan bersikap masa bodoh dengan kualitas rumput laut yang



dihasilkan. Mereka hanya memanfaatkan alat seadanya untuk menjemur hasil panen mereka. Pemerintah yang seharusnya bertanggungjawab dan mengambil peran untuk menyelamatkan kondisi ini, justru bersikap seolah-olah tidak peduli dengan masalah yang dirasakan oleh para petani rumput laut. Sebagai masyarakat yang bernaung di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya menyadari betul situasi yang mendera para petani rumput laut saat ini. Walau secara materi kondisi saya tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Keinginan besar untuk merubah penghidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkhususnya desa matakus.

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan petani rumput laut pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya agar masyarakat petani rumput laut semakin mandiri. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. (Adisasmitha Rahardjo: 2011).

LANDASAN TEORI

Konsep Pemerintah

Pemerintah Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah, yang dapat diartikan sebagai berikut : 1. Melakukan pekerjaan menyuruh/ perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu. 2. Badan yang melakukan kekuasaan memerintah/kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan negara tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet termasuk pemerintahan). Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Istilah pemerintah dapat dibedakan antara pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR. Bentuk pemerintahan yang terkenal yaitu kerajaan dan republik, kerajaan adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Republik adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk semua jabatan tertentu. (Kansil & Christine: 2008).

Pemerintah merupakan lembaga atau institusi yang menyelenggarakan dan menyeimbangkan antara kebutuhan individu atau masyarakat akan barang dan pelayanan publik. Pemahaman ini sejalan dengan terminologi ilmu pengetahuan sosial modern yang mengartikan pemerintah daerah sebagai suatu sistem yang berfungsi bersama-sama dengan sistem lain dalam sistem yang besar, di mana semua sistem tersebut berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, desentralisasi pemerintahan merupakan pelimpahan kewenangan dan fungsi dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. (Adisasmitha Rahardjo: 2011).

Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, perbuatan, kegiatan, urusan, atau tindakan pemerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Eksekutif adalah cabang kekuasaan dalam negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan ataupun pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri.

Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

- Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Peran Pemerintah Daerah

Dalam kamus besar bahasa indonesia (2005). Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Pandangan tradisional tentang peran pemerintah bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidak

adilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti, pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan polisional. Kebutuhan masyarakat di luar hal tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar.

Upaya-Upaya Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya memaksimalkan pembudidayaan petani rumput laut maka diperlukan suatu kajian dari aspek ekologis untuk kesesuaian lahan, daya dukung hingga strategi pengelolaannya dan pengembangannya. Pendekatan sistem melalui penyusunan model pengembangan budidaya rumput laut juga merupakan salah satu metode alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi rumput laut di daerah tersebut. Melalui proses pendekatan dan penyusunan model pengembangan maka akan dapat dihasilkan model sistem pengembangan budidaya rumput laut sebagai salah satu model dasar dalam budidaya rumput laut.

Dalam upaya peningkatan daya saing produk rumput laut di pasar global, Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengimplementasikan hal tersebut. Peran Pemerintah Indonesia sebagai Government Actor adalah pemegang kendali kebijakan untuk menentukan arah orientasi kebijakan negara. Pada dasarnya peran Pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing produk rumput laut dapat dianalisis berdasarkan Teori The Role of Government ke dalam tiga bentuk jenis upaya, yaitu:

- a) The role of support policies, peran Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan dalam negeri (domestik) yang mendukung upaya peningkatan daya saing produk rumput laut di pasar global. Beberapa kebijakan yang dimaksud adalah kemudahan kepada para pelaku usaha rumput laut untuk mendapatkan akses informasi, bantuan keuangan, subsidi pajak, dan beberapa kebijakan lainnya;
- b) The role of competition policies, peran Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan daya saing produk rumput laut Indonesia di pasar global melalui kebijakan yang mendukung pengembangan sektor industri domestik dengan memperhatikan porsi perkembangan sektor industri asing untuk pasar dalam negeri;
- c) The role of international policies, peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan pengaruh terhadap kebijakan internasional dalam mendukung pengembangan daya saing produk dalam negeri.

Konsep pemberdayaan

Kata pemberdayaan berasal dari kata empowerment yang artinya suatu pemberdayaan dalam meningkatkan potensi manusia agar dapat berorientasi pada pertanggungjawaban kerja yang dilakukan dengan cara yang logis untuk mencapai tujuan dengan melakukan segala bentuk pekerjaan yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan kualitas sumberdaya manusia yang dapat berprestasi dalam bidang yang ditekuni untuk mencapai tujuan. Blancard (dalam buku Wrihatnolo, & Nugroho, R: 2007).

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya. Sumodiningrat (dalam buku Mardikanto, T: 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian langsung kepada masyarakat dan lokasi Penelitian. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Menurut Moleong disamping menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Wawancara mendalam (depth interview) sebagai teknik utama yaitu data yang dikumpulkan dengan hasil dialog langsung dengan responden berdasarkan acuan pertanyaan yang disusun.
- b. Observasi, yaitu proses pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.



- c. Dokumentasi, pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan benda-benda tertulis lainnya seperti buku-buku, notulen harian dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberikan pelatihan.

Dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani rumput laut, maka dilakukan penyuluhan atau pelatihan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan kepada petani rumput laut tentang cara budidaya rumput laut yang baik. Kaitannya dengan aspek budidaya rumput laut, maka pengetahuan tentang berbagai hal perlu disampaikan kepada petani rumput laut. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan diketuai oleh pengelola atau para petani rumput laut adalah pengaruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut. Hal lain juga yang perlu dipahami oleh para petani rumput laut adalah Penentuan lokasi pembudidayaan yang tepat dilakukan dengan maksud karena kecerahan air yang dipakai untuk membudidaya rumput laut sangat mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup rumput laut yang dibudidayakan, seperti halnya tumbuhan air lainnya yang memerlukan sinar matahari sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis bagi pertumbuhannya sehingga tidak cepat diserang oleh hama.

Para petani rumput laut yang berada di Desa Matakus telah mendapat bentuk-bentuk pelatihan dari pemerintah terkait dengan proses pembudidayaan rumput laut. Pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah (Dinas Perikanan dan Kelautan) kepada petani dimaksudkan agar dalam pembudidayaan rumput laut yang dilakukan tidak terjadi kesalahan sehingga pada saat panen hasil yang didapatkan lebih bagus kualitasnya.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan memberikan pelatihan kepada para petani sehingga para petani mampu memproduksi rumput laut yang ada dengan benar. Hasil analisis peneliti dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

Penentuan lokasi pembudidayaan rumput laut sangat menentukan keberhasilan.

Penentuan lokasi pembudidayaan dilakukan dengan maksud karena kecerahan air yang dipakai untuk membudidaya rumput laut sangat mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup rumput laut yang dibudidayakan. Rumput laut seperti halnya tumbuhan air lainnya yang memerlukan sinar matahari sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis bagi pertumbuhannya. Perairan yang keruh akan menghambat pertumbuhan rumput laut. Adapun kutipan hasil wawancara dari beberapa informan sebagai berikut :

Bapak Angki Fordatkosu Sebagai Ketua kelompok petani rumput laut, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam penentuan lokasi budidaya rumput laut itu merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam membudidaya rumput laut. Penentuan lokasi ini tidak sembarang kita buat, melainkan kita harus mencari tahu posisi-posisi yang strategis yang cocok untuk pembudidayaan. Biasanya lokasi yang paling cocok di daerah kita ini adalah lokasi yang berpasir sehingga petani rumput laut itu lebih mudah dalam menancapkan patok”.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh bapak Roberth Reskin, S.Pi sebagai staf di bidang budidaya perikanan, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pembudidayaan rumput laut tidak semata-mata kita membudidayakannya disemua tempat. Pembudidayaan rumput laut harus dilakukan ditempat yang

strategis. Maka dari itu penentuan lokasi budidaya rumput laut sangat membantu para petani rumput laut, karena sebelum adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah tentang penentuan lokasi, banyak tanaman rumput laut para petani itu yang mengalami kerusakan”. Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Fredy Turalely sebagai kepala desa, beliau mengatakan bahwa 3 :

“Para petani yang membudidaya rumput laut banyak yang masih belum mengetahui tentang lokasi atau tempat yang strategis dalam pembudidayaan rumput laut. Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah datang dan memberikan pelatihan berupa penentuan lokasi pembudidayaan kepada para petani. Setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah, para petani sudah mulai memahami penentuan

lokasi dalam pembudidayaan rumput laut, sehingga produksi rumput laut di desa kita ini menjadi meningkat”.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Cemu Boinsera sebagai petaniRumput Laut, yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada kami para petani tentang penentuan lokasi pembudidayaan rumput laut ini sangat membantu kami dalam pembudidayaan rumput laut. Kami tidak tau lokasi yang baik dalam budidaya rumput laut itu seperti apa, yang kami tahu itu hanyalah bekerja sesuai dengan pengalaman yang kami dapatkan dari orang tua kami. Namun setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah tentang lokasi budidaya rumput laut, hasil produksi rumput laut kami menjadi meningkat”.

Berdasarkan hasil wawancara tentang penentuan lokasi dan pemilihan bibit pembudidayaan rumput laut di Desa Matakus hasil analisis menunjukan bahwa : Dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani tentang penentuan lokasi pembudidayaan rumput laut ini sangat membantu para petani dalam pembudidayaan rumput laut. Dimana sebelumnya para petani tidak tau lokasi yang baik dalam budidaya rumput laut itu seperti apa yang para petani tau itu hanyalah bekerja sesuai pengetahuan sendiri sehingga hasil yang mereka dapatkan tidak maksimal oleh karena adanya berbagai permasalahan seperti yang dijelaskan di atas. Namun, setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah tentang lokasi budidaya rumput laut banyak petani rumput laut yang sangat terbantu dengan adanya pelatihan tersebut. Hal itu dapat dilihat dengan adanya peningkatan produksi rumput laut yang ada di Desa Matakus. Adanya pelatihan ini juga dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi para petani rumput laut yang sebelumnya tidak mengetahui seperti apa dan untuk apa ditetapkannya lokasi pembudidayaan rumput laut.

Pemberian dana bagi petani rumput laut oleh pemerintah merupakan perwujudan pasal 62 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yaitu pemerintah mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya rumput laut, baik sumber dalam negeri maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; pemberian dana juga merupakan bentuk komitmen mendukung petani memperoleh produksi rumput laut yang lebih tinggi untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Pemberian Dana kepada petani rumput laut hendaknya dapat memberikan manfaat nyata pada peningkatan produksi. Peningkatan produksi diharapkan berpengaruh langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Dalam pembudidayaan rumput laut di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.oleh karena itu, para petani rumput laut di Desa Matakus mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, yang dipergunakan untuk memenuhi pembiayaan investasi infrastruktur budidaya, pembelian bibit dan pengadaan alat budidaya rumput laut yang masih kurang. Selain itu juga pemberian dana dapat dipergunakan untuk pembayaran upah tenaga kerja agar dapat meningkatkan motivasi dan dapat merangsang para pekerja (petani) dalam bekerja dengan memberikan dana kepada para petani sehingga para petani dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pembudidayaan rumput laut.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan memberikan dana kepada para petani sehingga para petani dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pembudidayaan rumput laut. Hasil analisa peneliti dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1) Besarnya bantuan dana dan pemanfaatannya oleh kelompok atau individu petani rumput laut.

Kelompok atau individu petani rumput laut yang ada di Desa Matakus dalam usaha budidaya rumput laut banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dana-dana untuk pengembangan dan peningkatan produksi rumput laut. Adapun penjabaran menurut informan sebagai berikut :

Menurut Bapak Yohanan Aminadab Lamma Sebagai Ketua kelompok petani rumput laut, beliau mengatakan bahwa :

“Para petani yang terbentuk dalam kelompok maupun individu sudah sangat terbantu sekali dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Dana yang diberikan pemerintah biasanya rata-rata Rp. 20.000.000 per kelompok dengan jumlah petani setiap kelompok adalah 18 orang. Bantuan yang diberikan ini kemudian dimanfaatkan oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan dalam pembudidayaan rumput laut seperti pengadaan alat-alat yang masih kurang atau sudah rusak, dan pembelian bibit”.



Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh bapak Cemu Boinsera sebagai petani rumput laut, beliau mengatakan bahwa :“Kami petani rumput laut sangat terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah.Kebanyakan dari kami berkelompok itu mendapat bantuan sampai dengan Rp.20.000.000, dana dari pemerintah itu biasa kami gunakan untuk biayapenambahan pengadaan alat-alat dan bibit”.Dari hasil wawancara dengan informan dapat di analisis bahwa pemerintah memberikan bantuan dana kepada para petani yang terbentuk dalam kelompok-kelompok dimana dalam satu kelompok sebanyak 18orang. Danatersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan dalam membudidayakan rumput laut Berikut :

Hasil wawancara dengan bapak Roberth Reskin sebagai staf bidang budidaya perikanan, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pemberian bantuan yang kami berikan kepada petani targetnya adalah agar para petani itu bisa melakukan pengadaan-pengadaan alat atau bibit untuk pembudidayaan rumput laut yang masih kurang dalam memproduksi rumput laut. biaya yang kami berikan tergantung pada keperluan yang petani perlukan, biaya paling besar yang selama ini kami berikan kepada para petani sebesar Rp. 20.000.000”.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Yulius Londar sebagai staf Dinas Perikanan, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam menangani permasalahan dalam proses pembudidayaan rumput laut di Desa Bolua, kami dari pemerintah biasa juga membantu para petani rumput laut dengan memberikan dana kepada para petani. Dana yang biasa kita berikan kepada petani berkisar sampai Rp.20.000.000-an. Hal ini kami lakukan untuk membantu petani dalam pengadaan kebutuhan pertanian rumput laut, seperti membeli bibit yang masih kurang ataupun untuk pengadaan alat-alat yang sudah rusak”.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat di analisis bahwa Dalam pemberian bantuan yang berikan oleh pemerintah kepada petani targetnya adalah agar para petani itu bisa melakukan pengadaan-pengadaan alat atau bibit untuk pembudidayaan rumput laut yang masih kurang dalam memproduksi rumput laut. biaya yang diberikan oleh pemerintah tergantung pada keperluan yang petani perlukan, biaya paling besar yang diberikan kepada para petani sebesar Rp. 20.000.000 pemerintah memberikan bantuan dana kepada para petani yang terbentuk dalam kelompok-kelompok dimana dalam satu kelompok sebanyak 18 orang. Dana tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan dalam membudidayakan rumput laut. manfaat yang didapatkan oleh para petani rumput laut itu sangat signifikan. Dari besarnya bantuan dana ini para petani dapat mengadakan perlengkapan yang dipakai untuk membudidayakan rumput laut, seperti pengadaan kembali bibit yang sudah habis terpakai dan pengadaan alat-alat pembudidayaan rumput laut yang telah rusak Dari hasil wawancara diatas maka di dukung dengan data sekunder yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Kelompok petani rumput laut yang menerima bantuan dana Tahun 2020

| No | Nama Kelompok | Jumlah dana (Rp) |
|----|---------------|------------------|
| 1 | Awawar | Rp20.000.000 |
| 2 | Total bantuan | Rp20.000.000 |

Sumber: Dinas Perikanan 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa pemerintah memberikan bantuan dana sebesar Rp 20.000.000 untuk masing-masing kelompok. Dana yang diterima oleh kelompok dapat melalui dengan mengajukan proposal kepada Dinas Perikanan.

2) Upah tenaga kerja sebagai bentuk motivasi.

Tenaga kerja yang bekerja di tempat pembudidayaan rumput laut dihargai jasanya dengan upah. Upah yang diterima tenaga kerja merupakan salah satu bentuk motivasi atau rangsangan dari pemilik usaha (petani rumput laut). Berikut hasil penjabaran wawancara bersama informan dijabarkan sebagai berikut :

Menurut Bapak Angki Fordatkosu Sebagai Ketua kelompok petani rumput laut, beliau mengatakan bahwa :

“Upah tenaga kerja biasanya diberikan kepada para pekerja yang bekerja di tempat pemilik usaha. Upah tenaga kerja ini bisa diterima berdasarkan kemampuan pekerja yang bekerja. Para pekerja yang mendapatkan upah biasanya bekerja sebagai pengikat bibit”.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh bapak Ever Boinsera Sebagai petani rumput, beliau mengatakan bahwa :

“Upah tenaga kerja biasanya diberikan kepada orang yang tugasnya mengikat bibit di tali. Pembayaran upah itu kita hitung berdasarkan jumlah tali yang mereka (pekerja) dapatkan. Biasanya kita beri upah itu 3 tali dengan harga lima puluh ribu rupiah”.

Hal serupa hampir sama dengan yang dikatakan oleh bapak Nikodemus Boinsera sebagai pekerja pengikat bibit, beliau mengatakan bahwa :

“Kami biasanya mendapatkan upah dari pemilik usaha rumput laut berdasarkan jumlah tali yang kami pakai untuk mengikat bibit. Biasanya tiga tali dan satu tali itu panjangnya mencapai 10-15 meter itu kami dibayar dengan jumlah uang sebanyak lima puluh ribu. Semakin banyak tali yang kami gunakan untuk mengikat bibit semakin banyak juga kami mendapatkan uang dari pemilik usaha (petani rumput laut)”.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh ibu Novita Kelmaskosu sebagai pekerja pengikat bibit, beliau mengatakan bahwa :

“Pekerjaan yang saya lakukan adalah sebagai pengikat bibit di tempat budidaya rumput laut milik orang (petani rumput laut). Saya biasa diberi upah dari jumlah tali yang saya ikat. Biasanya kalau tiga tali saya dibayar dengan upah sebesar lima puluh ribu”.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh bapak Rudi Boinsera sebagai petani rumput laut, beliau mengatakan bahwa :

“Upah tenaga kerja biasanya diberikan kepada orang yang bekerja membantu kami dalam mengikat bibit rumput laut pada tali. Kami biasa memberi harga lima puluh ribu per tiga tali. Kami biasanya membayar para pekerja itu menggunakan dana yang kami terima dari pemerintah atau juga dengan kas dari kelompok kami”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan tentang upah tenaga kerja sebagai bentuk motivasi di Desa Matakus, hasil analisa menunjukkan bahwa : para petani rumput laut dan para pekerja selalu melakukan kerja sama diantara mereka. Para petani rumput laut memerlukan bantuan dari para pekerja sebagai pengikat bibit dan para pekerja tersebut dibayar dengan jumlah uang yang telah disepakati yaitu lima puluh ribu per tiga tali. Hal ini membuat masyarakat yang ada di Desa Matakus bisa mendapatkan pekerjaan tambahan untuk penambahan biaya hidup mereka. Untuk memperkuat Hasil wawancara di atas dapat diperkuat dengan hasil dokumentasi berikut ini :

Gambar 1 Wawancara dengan para pekerja sebagai pengikat rumput laut



Dok.17 Maret 2023



Gambar di atas menunjukkan bahwa Para pekerja ini mendapatkan upah dari pemilik usaha budidaya yang dikerjakan oleh mereka. Upah yang diberikan adalah Rp 50.000 dengan sebanyak 3 tali yang mereka ikat dan diberikan langsung oleh pemilik usaha. Satu tali panjangnya 10-15 meter sehingga dalam satu hari para pekerja ini mendapatkan Rp 100.000-150.000 dengan banyak tali yang mereka ikat adalah 5 sampai 6 tali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah cukup baik dilaksanakan, hal ini dapat diukur dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan. Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil tentang memberikan pelatihan dalam Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan bahwa : dalam penentuan lokasi, penyediaan bibit dan perancangan metode budidaya sangat membantu para petani rumput laut dalam menghadapi permasalahan yang ada. Misalnya dalam menangani hama.
2. Memberikan Bantuan Alat. Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil tentang Pemberian Bantuan Alat dalam Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan bahwa : Dengan adanya bantuan alat yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu para petani dalam membudidayakan rumput laut karena kebanyakan alat-alat yang dimiliki oleh para petani sudah sangat lama sehingga mengalami kerusakan untuk pembiayaan investasi infrastruktur budidaya dan perlengkapan lain, seperti pembelian bibit, dan upah tenaga kerja. Dampak dari pemanfaatan dana yang diterima oleh para petani adalah adanya meningkatkan produktivitas rumput laut di Desa Matakus.
3. Pemberian Dana. Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil tentang Pemberian Dana yaitu Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan bahwa : Dana yang diberikan oleh pemerintah dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat petani rumput laut yaitu untuk pembiayaan investasi infrastruktur budidaya dan perlengkapan lain, seperti pembelian bibit, dan upah tenaga kerja. Dampak dari pemanfaatan dana yang diterima oleh para petani adalah adanya meningkatkan produktivitas rumput laut di Desa Matakus.

Saran

1. Memberikan pelatihan. Diharapkan kepada pemerintah Dinas Perikanan agar terus memberikan pelatihan-pelatihan yang baru dan bermutu kepada masyarakat petani rumput laut agar mereka lebih produktif lagi dalam membudidayakan rumput laut yang ada di desa Matakus.
2. Memberikan Bantuan Alat. Diharapkan kepada pemerintah Dinas Perikanan untuk selalu tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat petani rumput laut dalam hal peralatan yang dimiliki oleh para petani untuk terus diperbaharui atau diganti dengan yang baru agar dalam pembudidayaan rumput laut tidak terjadi kemacetan.
3. Pemberian Dana. Diharapkan kepada pemerintah Dinas Perikanan dalam kaitannya dengan dana yang diberikan agar pemberian dana yang diberikan kepada masyarakat petani rumput laut, dapat berorientasi pada kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan produksi rumput laut yang ada di Desa Matakus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Bebbington, Anthony. 2000. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Christine dan Kansil, 2008. Sistem pemerintahan Indonesia. Bumi aksara: Jakarta.
- Darmawan, 2000. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Maluku Tenggara Barat, 2011 Inpex Masela, 2012
- Mardikanto, T. dan Soebiakto, P. 2012. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

- Musgrave, R.A dan Musgrave, P. B. 1991. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Noor, Isran. 2014. Rekonstruksi Indonesia: Konsep Pemikiran Isran Noor Tentang Pembangunan Berbasis Kewilayahan. Bangun Indonesia Press: Jakarta.
- Ongkomulyo, T. dkk, 2008. Budi daya dan pengolahan rumput laut. Agro Media Pustaka: Jakarta.
- Parsons, et al. 1994. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Matakus.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Desa.
- Sarundajang. 2005. Pemerintah Daerah di Berbagai Negara. Kata Hasta Pustaka Anggota Ikapi: Jakarta Selatan.
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta: Bandung.
- Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Alfabeta: Bandung.
- Sumodiningrat. 1997. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Swift dan Levin, 1987. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tentang perikanan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Wrihatnolo, R dan Nugroho, R. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Elex Media: Jakarta.